

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi manajemen bencana tanah longsor di Kota Sawahlunto menggunakan analisis SWOT dan pendekatan thematic analysis menunjukkan bahwa BPBD telah melaksanakan berbagai program seperti Sitaruna Darling, pemasangan rambu peringatan, penyusunan dokumen kajian risiko bencana, pembentukan forum berbasis masyarakat seperti Destana, KSB, dan SPAB, serta koordinasi lintas instansi dalam tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana. Namun, pelaksanaan ini masih menghadapi kendala, termasuk penyuluhan yang belum merata, keterbatasan personil, anggaran terbatas, dan lemahnya regulasi tata ruang serta izin bangunan. Di sisi lain, peluang yang mendukung pengurangan risiko bencana mencakup antusiasme masyarakat terhadap edukasi kebencanaan, budaya gotong royong, pemanfaatan teknologi, serta ketersediaan dana dari pemerintah desa, BNPB, dan dana pikir. Kota Sawahlunto juga menghadapi ancaman, seperti topografi perbukitan yang didominasi oleh daerah sedimentasi, curah hujan tinggi, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dan mitigasi tanah longsor. Sehingga strategi yang dapat dirumuskan yaitu melakukan peningkatan sinergi antara BPBD, DPR, dan pemerintah desa untuk memanfaatkan dana pikir, penguatan mitigasi struktural berbasis partisipasi masyarakat, pemerataan penyuluhan kebencanaan, penguatan regulasi, optimalisasi program Sitaruna Darling dan sistem peringatan dini, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk tanggap bencana dan pemerataan rehabilitasi pasca bencana dengan dukungan dana hibah BNPB. Kesimpulan ini menekankan perlunya penguatan kapasitas manajemen bencana melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat

## 5.2 Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah keberhasilan kegiatan manajemen bencana dapat tercapai apabila ada kerjasama multisektor. Selain BPBD dan instansi terkait peran dan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bencana sangat diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan berbasis masyarakat dengan monitoring yang dilakukan oleh BPBD.

